

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penatausahaan aset tetap pemerintah daerah kota kupang yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor penyebab penata usahaan tidak berjalan dengan baik adalah sumber daya manusia yang kurang pemahaman tentang penatausahaan aset tetap, ketiadaan dokumen pendukung, teknologipenunjangkegiatan proses penatausahaan, dan dasar hukum yang tidak ditaati oleh pejabat penatausahaan aset tetap khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik adalah yang pertama melakukan pelatihan kepada Bidang Akuntansi dan Aset untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah, termasuk peningkatan kemampuan dalam mengelola barang milik daerah secara baik, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan memperbaiki system administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, melakukan pendampingan kepada pengurus barang setiap SKPD di Kota Kupang, dan yang ketiga memperbaiki

administrasi menjadi lebih baik lagi khususnya pada saat proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang adalah melakukan penatausahaan aset tetap yang baik dan benar dengan cara menciptakan sumberdaya manusia yang kompeten dalam memahami tata cara pengelolaan aset yang baik sebagaimana termuat dalam regulasi yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut, maka para pihak yang terkait dengan penatausahaan aset tetap perlu diberikan pelatihan tentang tata cara penatausahaan aset tetap sesuai dengan amanat regulasi yang ada, melakukan kordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset, setiap pengurus barang harus melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan jujur, mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah, memiliki rasa tanggungjawab dalam mengembangkan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu setiap pihak perlu mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan barang milik daerah khususnya penatausahaan aset tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrians, Ikbar 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Kabupaten Jeneponto*. Skripsi Makasar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salema Empat. Jakarta.
- Mardiosmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Margono. 2013. *Penatausahaan Barang Milik Negara*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Piri, Triski. 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Hasanuddin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- Suradi, 2009. *Akuntansi Pengantar I*, Edisi Pertama. Gava Media. Yogyakarta.
- Saputra, Ardi Rahmawan. 2012. *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Sahlan, Muhammad. 2015. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Sutri Kilonung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik Sherly. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan*

*dan Aset Daerah KabupatenTomohon.* Jurnal Emba. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.